

Mobil Kerap Nyangkut di Separator, Ketua DPRD Depok Minta Dishub Kaji

DEPOK (IM) - Ketua DPRD Kota Depok, TM Yusufyah Putra menyeroi pembatas jalan di Margonda, Depok, Jawa Barat, yang kerap bikin kendaraan roda empat tersangkut. Yusuf menyarankan keberadaan separator itu dikaji lagi jika menjadi kendala pengguna jalan.

"Ya separator itu berfungsi sebetulnya untuk memperlancar dari lalu lintas yang ada. Kalau memang dirasakan ada kendala, saya minta juga dikaji oleh Dishub berkenaan dengan penggunaan separator," papar Yusufyah Putra setelah menghadiri paripurna di kantor DPRD Depok, Cilandak, Jawa Barat, Rabu (31/8). Yusuf menyebut saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tengah merencanakan pebaran trotoar di Margonda. Ia berharap hal tersebut juga bisa terealisasi.

"Pemerintah juga tengah merencanakan pebaran terhadap trotoar ya dan mudah-mudahan bisa terealisasi," ungkapnya.

Yusufyah Putra meminta Dishub Kota Depok untuk tanggap menyikapi permasalahan itu. Terlebih, jika polisi telah menyurati Dishub untuk mengkaji pembongkaran separator.

"Ya (Dishub) proses lebih cepat tanggap dan juga dilakukan dengan kajian. Mungkin juga kepolisian sudah mengkaji tinggal dibahas terhadap surat yang sudah masuk ke Dishub," katanya.

Apabila kajian itu telah dilakukan oleh Dishub, lanjut Yusuf, laporannya bisa diajukan ke Wali Kota kemudian ke DPRD.

"Nanti Dishub bisa

menyampaikan ke Wali Kota dan pengusulan ke DPRD berkenaan dengan kajian yang sudah dilakukan oleh kepolisian," kata Yusufyah.

"Karena memang kalau misalkan sudah dikaji dengan baik oleh pihak kepolisian harus segera, karena mungkin separator itu juga mengakibatkan kecelakaan," sambungnya.

Sebelumnya, satu unit mobil pribadi dan angkot tersangkut di separator Jalan Margonda, Kota Depok. Kedua mobil tersebut tersangkut dengan posisi saling membelakangi.

Peristiwa ini viral di media sosial. Dalam unggahan sebuah video di media sosial, kejadian ini menimbulkan kemacetan di Jalan Margonda, Depok.

Belum diketahui bagaimana kronologi kecelakaan mobil dan angkot itu. Kecelakaan mobil tersangkut separator Jalan Margonda ini terjadi pada Minggu (28/8) malam.

Sebagai informasi, kejadian mobil tersangkut separator Jalan Margonda ini sering terjadi. Separator jalan di Margonda, Depok, ini juga banyak dikeluhkan warga karena kerap menimbulkan kecelakaan.

Separator jalan ini sedianya dibuat untuk memisahkan kendaraan di jalur cepat dan jalur lambat.

Ada rambu-rambu sebelum masuk jalur cepat, bahwa motor dan angkot harus masuk jalur lambat.

Namun faktanya, banyak motor dan angkot tetap menggunakan jalur cepat. Di sisi lain, keberadaan separator jalan di Margonda ini dikritik lantaran pada malam hari tidak terlihat. ■ yan

4 Metropolitan

FOTO/ANT



MEMBERSIHKAN ECENG GONDOK DI WADUK PLUIT

Petugas UPK Badan Air DLH DKI Jakarta membersihkan tanaman eceng gondok di Waduk Pluit, Jakarta, Rabu (31/8). Unit Pelaksana Kebersihan (UPK) Badan Air Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menyebutkan pembersihan eceng gondok itu untuk mencegah terjadinya pendangkalan air di waduk tersebut.

DKI Rancang Uji Publik Terkait Usulan Pengaturan Jam Kerja

Dishub DKI harus berhati-hati dalam melakukan kajian, karena pengaturan jam masuk kantor ini juga melibatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk sektor swasta. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo tidak ingin para pengguna transportasi umum terkena imbas akibat pengaturan jam kerja ini.

JAKARTA (IM) - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan pemerintah akan merancang uji publik soal usulan pengaturan jam kerja untuk mengurangi kemacetan. Uji publik itu akan melibatkan instansi pemerintah pusat dan daerah serta seluruh asosiasi. "Kami harus uji publik dengan melibatkan semua asosiasi," kata Syafrin Liputo

di Jakarta, Rabu (31/8).

Dishub DKI sudah menggelar diskusi yang melibatkan para pakar dan Kementerian Perhubungan soal pengaturan jam masuk kerja di Jakarta. Disepakati uji coba pengaturan jam kantor karena dinilai positif untuk menekan kepadatan lalu lintas. "Semuanya secepat ini positif bisa dilakukan uji coba tetapi kami harus lakukan uji publik," ujarnya.

Dishub DKI harus berhati-hati dalam melakukan kajian, karena pengaturan jam masuk kantor ini juga melibatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk sektor swasta. Syafrin tidak ingin para pengguna transportasi umum terkena imbas pengaturan jam kerja. Padahal tujuan utama pengaturan jam masuk kantor itu adalah mengatur mobilitas agar lebih efisien, bukan mengatur distribusi kendaraan di jam tidak sibuk.

Pemprov DKI juga perlu mendiskusikan lebih dalam dampaknya terhadap perekonomian, termasuk soal biaya yang ditimbulkan.

Namun Syafrin belum merinci waktu pelaksanaan uji publik tersebut.

Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat jumlah kendaraan bermotor terus meningkat setiap tahun.

Hingga 2020, jumlah kendaraan bermotor mencapai 20,2 juta unit. Hampir 80 persennya adalah sepeda motor atau 16,1 juta unit.

Sisanya adalah mobil penumpang mencapai 3,36 juta unit dan truk 680 ribu unit.

Pengaturan jam kerja adalah upaya Pemprov DKI

Jakarta untuk menekan angka kemacetan di Ibu Kota, selain kebijakan ganjal genap dan rekayasa lalu lintas. Pemprov DKI juga memberlakukan tarif integrasi tiga moda transportasi Rp 10.000 untuk mendorong peralihan pengguna kendaraan pribadi ke transportasi publik. ■ yan

Dishub DKI tak Ajukan Tambahan Subsidi Tarif Integrasi ke DPRD

JAKARTA (IM) - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta tidak mengajukan tambahan subsidi kepada DPRD DKI untuk tiga moda transportasi massal. Hal itu setelah pemberlakuan tarif integrasi karena sudah cukup dibayai menggunakan anggaran public service obligation (PSO). "Mencermati besaran subsidi saat ini, itu tidak akan ada penambahan subsidi," kata Kepala Dishub DKI, Syafrin Liputo di Jakarta, Rabu (31/8).

Untuk tahun pertama dan kedua pada 2023, Dishub DKI memastikan tidak mengajukan tambahan subsidi. "Tahun pertama dan kemudian tahun depan sudah dihitung," kata Syafrin.

Dia tidak memercini proyeksi peningkatan besaran subsidi yang timbul setelah pemberlakuan tarif integrasi, yang saat ini memasuki masa uji coba. Adapun uji coba berlangsung selama enam bulan sejak Juni hingga Desember 2022. "Saat ini kami terus lakukan simulasi," ujar Syafrin.

Adapun besaran subsidi untuk tiga moda transportasi massal, yaitu MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan bus Transjakarta pada 2019 mencapai Rp 14 miliar. Kemudian pada

2020 mencapai Rp 4 miliar, dan 2021 mencapai Rp 6 miliar.

Dia mengatakan, besaran subsidi itu berdasarkan data jumlah penumpang yang menggunakan layanan angkutan umum massal lebih dari satu moda. Sedangkan berdasarkan data Dishub DKI, dana PSO transportasi umum pada 2019 mencapai Rp 3,1 triliun dan meningkat pada 2022 menjadi Rp 3,5 triliun.

Pada 2022, besaran PSO untuk transportasi umum di DKI mencapai sekitar Rp 4 triliun dengan alokasi paling besar bus Transjakarta sekitar Rp 3,2 triliun, MRT sekitar Rp 600 miliar dan LRT Jakarta sekitar Rp 200 miliar.

Meski memastikan ada perubahan besaran subsidi akibat tarif integrasi tiga moda angkutan umum, menurut Syafrin, dalam jangka panjang, pasti ada peningkatan penggunaan transportasi massal. Hal itu lantaran tarif integrasi sebesar Rp 10 ribu sangat menguntungkan penumpang.

Berdasarkan hitungan salah satu konsultan, lanjut dia, apabila pengguna meningkat, maka meningkatkan pendapatan operator. Selain itu, biaya lain yang dikeluarkan pemerintah termasuk untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang diyakini akan turun seiring beralihnya penggunaan kendaraan pribadi.

Tak hanya itu, tingkat polusi udara juga diharapkan menurun karena masyarakat diperkirakan makin banyak menggunakan transportasi massal. "Satu hal yang paling utama adalah dengan integrasi kami harap semakin banyak masyarakat beralih dari menggunakan kendaraan pribadi ke angkutan umum massal," kata Syafrin. ■ yan

PEMBERITAHAUAN HASIL AKHIR PROSES LIKUIDASI
Dengan ini diumumkan bahwa proses likuidasi PT TARUNA MULTI UTAMA (dalam likuidasi) berkedudukan di Tangerang ("Perseroan") telah berakhir dan para pemegang saham telah menerima pertanggungjawaban Likuidator serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et discharge) kepada Likuidator, sebagaimana diuraikan dalam akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN (dalam likuidasi) tanggal 30 Agustus 2022 Nomor 34, dibuat dihadapan MYRA YUWONO, SH, Notaris di Jakarta.
Pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 152 ayat 3 UUPJT nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Tangerang, 1 September 2022 Likuidator PT TARUNA MULTI UTAMA (dalam Likuidasi)

PEMBERITAHAUAN HASIL AKHIR PROSES LIKUIDASI
Dengan ini diumumkan bahwa proses likuidasi PT INDAHJAYA SUKSES ABADI (dalam likuidasi) berkedudukan di Tangerang ("Perseroan") telah berakhir dan para pemegang saham telah menerima pertanggungjawaban Likuidator serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et discharge) kepada Likuidator, sebagaimana diuraikan dalam akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN (dalam likuidasi) tanggal 30 Agustus 2022 Nomor 35, dibuat dihadapan MYRA YUWONO, SH, Notaris di Jakarta.
Pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 152 ayat 3 UUPJT nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Tangerang, 1 September 2022 Likuidator PT INDAHJAYA SUKSES ABADI (dalam Likuidasi)

PENGUMUMAN
PT Axle Asia ("Perseroan"), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengumumkan bahwa boltech Digital Solutions Holdings Limited bermaksud melakukan pengambilalihan atas saham pada Perseroan dari masing-masing pemegang saham Perseroan yang dapat menyebabkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan ("Rencana Pengambilalihan").
Rencana Pengambilalihan akan tergantung dan tunduk pada persetujuan dari lembaga pemerintahan tertentu dan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan di dalam anggaran dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPJT").
Seluruh kreditur atau bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang keberterangan atas Rencana Pengambilalihan tersebut dapat mengajukan keberatannya secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan:
PT Axle Asia Victoria Building, Lantai 4, Jalan Sultan Hasanuddin No. 47-51, RT/RW 006/002, Melawai, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan
Demikian pengumuman ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (8) UUPJT.
Jakarta, 1 September 2022 Unduk dan atas nama Direksi PT Axle Asia



PT TRIMUDA NUANSA CITRA Tbk DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN					
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2022					
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)					
URAIAN	30 Juni 2022	31 Desember 2021	URAIAN	30 Juni 2022	31 Desember 2021
ASET			LIABILITAS DAN EKUITAS - NETO		
ASET LANCAR			LIABILITAS		
Kas dan bank	5.902.656.478	5.460.402.146	LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Pinjaman penunjam nilai			Utang usaha	4.106.645.684	4.083.475.815
Pinjaman penunjam nilai			Utang piutang	350.605.323	309.083.366
Piutang sebesar Rp 956.474.541			Utang lain-lain	86.079.750	121.345.000
pada 30 Juni 2022 dan Piutang sebesar Rp927.479.091 pada			Utang akrual	1.044.724.544	1.227.912.143
31 Desember 2021	13.488.524.304	14.846.252.732	Utang jangka panjang	145.425.255	320.108.998
Persediaan	90.665.976	95.568.253	yang akan jatuh tempo dalam waktu		
Utang muka dan beban dibayar			salu tahun	496.644.756	627.171.962
dumaka	1.886.528.369	1.391.801.816	Utang sewa	195.940.945	441.465.370
			Utang pembiayaan	6.427.066.337	7.129.662.654
Jumlah Aset Lancar	21.368.395.127	21.794.024.947	Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		
			LIABILITAS JANGKA PANJANG		
ASET TIDAK LANCAR			Utang pembiayaan jangka panjang		
Aset tetap - setelah dikurangi			setelah dikurangi bagian yang akan		
akumulasi penyusutan sebesar			jatuh tempo dalam waktu satu tahun		
Rp 11.462.410.944 pada tanggal			Utang sewa	49.571.625	49.571.625
30 Juni 2022 dan Rp 11.013.663.940			Utang pembiayaan	783.358.470	756.525.975
pada tanggal 31 Desember 2021			Utang piutang	156.013.596	156.013.596
28.903.593.318	29.063.819.522		Liabilitas imbalan kerja karyawan	3.436.972.557	3.208.155.441
Aset takberwujud - setelah dikurangi			Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	4.274.802.652	4.170.366.637
akumulasi amortisasi sebesar			JUMLAH LIABILITAS	10.701.868.990	11.300.029.291
Rp 757.737.213 pada tanggal			EKUITAS - NETO		
30 Juni 2022 dan Rp 635.142.745			Modal saham - nilai nominal		
pada tanggal 31 Desember 2021	390.855.974	245.946.522	Rp. 100 per saham	42.164.000.000	42.164.000.000
391.985.363	420.892.160		Modal desah - 4.265.000.000 saham	6.940.515.304	6.940.515.304
Aset lainnya	660.085.347	917.797.911	Modal ditempatkan dan disetor		
660.085.347	917.797.911		permula - 421.540.000 saham		
Jumlah Aset Tidak Lancar	30.896.519.992	30.648.456.115	Tambahan modal disetor		
			Seluruh nilai transaksi dengan		
JUMLAH ASET	52.264.915.118	52.442.481.062	Keperentingan Non-pengendali	(1.163.758)	(1.163.758)
			Defisit	(2.606.117)	(2.942.692)
			KEPENTINGAN NON-PENGENDALI		
			EKUITAS Yang Dapat Diatribusikan		
			Keperentingan Non-pengendali	41.565.652.245	41.145.394.363
			KEPENTINGAN NON-PENGENDALI	41.565.652.245	41.145.394.363
			JUMLAH EKUITAS - NETO	41.565.046.129	41.142.451.771
			JUMLAH LIABILITAS DAN		
			EKUITAS - NETO	52.264.915.118	52.442.481.062

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - NETO KONSOLIDASIAN INTERIM						
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2022						
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)						
	Modal Saham	Tambahan	Selisih Nilai	Ekuitas yang	Keperentingan	Jumlah Ekuitas -
	Ditempatkan dan	Modal	Transaksi dengan	Dapat Diatribusikan	Non-pengendali	Neto
	Disetor Pemuh	Disetor	Keperentingan	Kepada Pemilik	Non-pengendali	Neto
			Non-pengendali	Entitas Induk		
Saldo 1 Januari 2021	42.164.000.000	6.940.515.304	(1.163.758)	39.943.854.995	(3.884.970)	39.939.970.025
Rugi komprehensif periode berjalan	-	-	-	486.510.795	665.695	487.176.490
Rugi komprehensif lain	-	-	-	-	-	-
Saldo 30 Juni 2021	42.164.000.000	6.940.515.304	(1.163.758)	40.430.365.790	(3.219.275)	40.427.146.515
Selisih nilai transaksi dengan Keperentingan Non-pengendali	-	-	-	-	-	-
Lababa komprehensif periode berjalan	-	-	-	715.028.573	276.683	715.305.256
Saldo 31 Desember 2021	42.164.000.000	6.940.515.304	(1.163.758)	41.145.394.363	(2.942.692)	41.142.451.771
Lababa komprehensif periode berjalan	-	-	-	420.257.882	336.475	420.594.358
Saldo 30 Juni 2022	42.164.000.000	6.940.515.304	(1.163.758)	41.565.652.245	(2.606.117)	41.563.046.129

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRESHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN INTERIM					
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2022					
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)					
URAIAN	30 Juni 2022	30 Juni 2021	URAIAN	30 Juni 2022	30 Juni 2021
PENDAPATAN			PENDAPATAN		
BEBAN POKOK PENJUALAN	34.573.991.630	36.473.991.630	LABA KOTOR	9.043.336.307	9.745.531.728
LABA KOTOR	9.043.336.307	9.745.531.728	Beban penjualan	1.358.542.720	1.303.368.596
Beban penjualan	1.358.542.720	1.303.368.596	Beban umum dan administrasi	6.809.368.873	7.628.463.408
LABA OPERASI	875.424.913	816.669.424	LABA OPERASI	22.878.379	66.561.931
LABA OPERASI	875.424.913	816.669.424	LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	942.312.246	1.503.813.511
LABA sebelum asetat tetap	22.878.379	66.561.931	MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		
Lain-lain bersih	44.009.953	620.582.156	Kini	(264.005.324)	(780.202.720)
Jumlah Laba Bersih	486.421.832	1.384.395.667	Tanggungan	(257.712.564)	(284.722.141)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	486.421.832	1.384.395.667	LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	420.594.358	438.888.650
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPRESHENSIF LAIN			PENGHASILAN (BEBAN) KOMPRESHENSIF LAIN		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya			Manfaat pajak penghasilan terkait		61.907.487
Pengukuran kumulatif labilias imbalan kerja			Rugi komprehensif lain-setelah pajak		(13.619.647)
Manfaat pajak penghasilan terkait			JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	420.594.358	487.176.490
Rugi komprehensif lain-setelah pajak			JUMLAH LABA BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	420.594.358	487.176.490	Pemilik Entitas Induk	420.257.882	438.261.586
JUMLAH LABA BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			Keperentingan Non-pengendali	336.475	627.064
Pemilik Entitas Induk	420.257.882	486.510.795	JUMLAH	420.594.358	438.888.650
Keperentingan Non-pengendali	336.475	665.695	JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
JUMLAH	420.594.358	487.176.490	Pemilik Entitas Induk	420.257.882	486.510.795
LABA PER SAHAM	1,00	1,04	Keperentingan Non-pengendali	336.475	665.695
			JUMLAH	420.594.358	487.176.490

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN INTERIM					
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2022					
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)					
URAIAN	30 Juni 2022	30 Juni 2021	URAIAN	30 Juni 2022	30 Juni 2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari pelanggan	35.931.720.057	34.653.177.486	Penerimaan dari pelanggan	35.931.720.057	34.653.177.486
Pembayaran kepada:			Pembayaran kepada:		
Karyawan	(21.526.312.563)	(18.880.842.960)	Karyawan	(21.526.312.563)	(18.880.842.960)
Kegiatan operasional lainnya	(14.255.975.287)	(2.998.694.519)	Kegiatan operasional lainnya	(14.255.975.287)	(2.998.694.519)
Kas Neto Diperoleh dari (digunakan) untuk Aktivitas operasi	1.482.966.838	179.888.168	Kas Neto Diperoleh dari (digunakan) untuk Aktivitas operasi	1.482.9	